

**STUDI PARTAI DEMOKRAT PADA PILKADA 2005 di KABUPATEN  
REMBANG**

**Oleh :  
DYAH AYU SULISTYAWATI**

**ABSTRACT**

The aims of this research is to describe : (1) History first of build Partai Demokrat and structure organization of Partai Demokrat at Rembang Regency. (2) Process and result of local elections 2005 at Rembang Regency. (3) Strategic of winning local elections 2005 at Rembang Regency.

This researchs method is historical method with heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Source of data used in this research are primary sources and secondary sources. Collecting data by interview, observation and literature study. The data analysis technique used is the technique of historical analysis, by performing external and internal criticism.

Based on these result it can be conclude : (1) History first of build Partai Demokrat and structure organization of Partai Demokrat at Rembang Regency are prepare for elections president and vice president 2004 in directly. Building of DPC Partai Demokrat at Rembang Regency while to local electing and it can be early change political system centralistic to be decentralistic. (2) Process and result of local elections 2005 at Rembang Regency are winning of company regent that be candidate by Partai Demokrat in the manner of 50 % voters. Because of combine between entrepreneur and religionist be a prime power to get support from Rembang Regency's people. (3) Strategic of winning local elections 2005 at Rembang Regency are make a election group that prepare, result, and last result to local election. And coordinate in village level for more be collect an aspiration and necessities of Rembang Regency's people in common. In addition also make even programs that need and suitable of Rembang Regency's people.

## PENDAHULUAN

Perubahan politik di Indonesia pada tahun 1998 dari pemerintahan sentralisasi menjadi pemerintahan desentralisasi. Orde baru yang mewujudkan pemerintahan sentral tergulingkan oleh kekuatan reformasi. Munculnya pergerakan reformasi menuntut Indonesia ke arah demokratisasi. Demokrasi mengakibatkan kebijakan yang semula berada dalam kekuasaan pusat menjadi cair dan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk beraspirasi dalam menentukan kebijakan.

Demokrasi mempunyai arti secara etimologis dan terminologis atau istilah. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara etimologis *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh Joseph A. Schumpeter, bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

(<http://monaliasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-demokrasi-html> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Berdasarkan sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Wujud dari munculnya demokrasi salah satunya dilakukan perubahan UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Perubahan undang-undang itu menjadikan perpindahan pengawasan sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu produk lain dari demokrasi adalah adanya pemilu untuk menentukan pemangku jabatan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan desa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 1 yang isinya "... Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Mengenai penentuan Kepala Daerah yang dilakukan melalui Pilkada diatur juga dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Pilkada adalah realisasi dari demokrasi lokal dan syarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel (Smith, 1985 : 9). Di masa Orde Baru, penentuan kepala daerah secara formal dilakukan oleh DPRD, sebuah parlemen lokal yang dibentuk melalui kompetisi antarpolisi politik dan kesertaan ABRI di dalamnya. Kepala daerah bukanlah pemimpin yang memperoleh mandat dan harus bertanggungjawab kepada rakyat di daerah, melainkan sebagai bawahan Presiden dan Mendagri. Kepala daerah tidak lebih sebagai kepanjangan tangan istana negara untuk mengendalikan masyarakat lokal.

Page dan Goldsmith (1987 : 3-8) menekankan agar membangun akses daerah guna mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pusat. Kebijakan-kebijakan pusat selalu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di daerah. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme yang tepat dari tingkat daerah untuk mempengaruhi kebijakan pusat. Penyaluran aspirasi daerah harus dilakukan di tingkat lokal dan melibatkan masyarakat daerah.

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi membawa arah demokrasi di tingkat lokal. Menunjuk putra daerah dianggap lebih baik dan dapat memberikan tanggung jawab serta membangun daerahnya lebih unggul. Kepala daerah, terutama bupati atau walikota, tidak lagi bertanggung jawab ke atas melainkan bertanggungjawab secara horizontal kepada parlemen (DPRD). Pemencaran kekuasaan yang melingkupi proses pilkada memang merupakan indikator tumbuhnya demokrasi lokal. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah pilkada merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

Pilkada juga merupakan sebuah awal untuk membangun *local good governance*, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas,

transparansi dan responsivitas pemerintah daerah. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan setelah pilkada, yakni: (a) Relasi antara kepala daerah, DPRD, dan masyarakat, (b) Akuntabilitas kepala daerah.

Akuntabilitas berkaitan dengan relasi “ke atas” antara kepala daerah dengan pemerintah di atasnya; relasi “ke samping” dengan DPRD; dan relasi “ke bawah” dengan masyarakat. Akuntabilitas kepala daerah ini merupakan persoalan yang serius dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah) dan demokrasi perwakilan. Jika tidak, desentralisasi hanya sebuah penggambaran pendeentralisasian kewenangan pemerintah nasional kepada elit lokal dan sama sekali tidak kepada masyarakat lokal. (Mawhood, 1983 : 8-10).

Pada dasarnya, pilkada dapat digunakan sebagai alat birokrasi dan sistem kerja pemerintahan terkecil yang baik untuk menata masyarakat daerah. Adanya pilkada diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat daerah dan memaksimalkan kemajuan daerah agar dapat menjadi salah satu penyangga perekonomian daerah pada khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya.

Pilkada di Kabupaten Rembang dipilih karena sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi untuk menjadi daerah maju di karesidenan Pati. Hal ini dilihat dari segi perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Rembang yang mengalami kemajuan dan menjadi salah satu komoditas unggul setelah sektor perikanan. Pengembangan dan pemeliharaan potensi daerah tersebut menuntut adanya pemimpin daerah yang cakap dan dapat mengelola potensi yang ada dengan strategis, sehingga pengambilan kebijakan dapat diterapkan dan disesuaikan dengan sosiokultur di Kabupaten Rembang.

Pilkada di Kabupaten Rembang tahun 2005 dilaksanakan sebagai tolok ukur perbaikan dan pembangunan daerah atau hanya menjadi alat bagi beberapa kelompok di masyarakat Kabupaten Rembang untuk mengendalikan laju kehidupan perpolitikan di tingkat Kabupaten. Terutama dari sudut pandang Partai Demokrat di Kabupaten Rembang sebagai partai pemenang. Karena fenomena yang terjadi di berbagai daerah, bahwa pelaksanaan pilkada justru hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan tingkat lokal tanpa memperhatikan pembangunan daerah yang seharusnya.

Pilkada tahun 2005 di Kabupaten Rembang dilaksanakan juga sebagai wujud dari desentralisasi dan perwujudan demokrasi di ranah lokal. Calon

pemimpin yang lolos dalam seleksi mampu mewakili aspirasi dari masyarakat Rembang. Dasar hukum pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rembang adalah UU No.32 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Perundang-undangan No.3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Undang-Undang No.22 Tahun 2007).

### **Deskripsi Lokasi**

Rembang adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang letaknya di ujung paling Timur. Daerah ini dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (yang terkenal dengan sebutan Pantura). Rembang terletak pada garis koordinat 111 000° - 111 030° Bujur Timur dan 603°-706° Lintang Selatan. Sebelah Utara, Rembang berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Blora, dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Pati (<http://rembang.co.id> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

Luas wilayah Rembang adalah 101.408 ha. Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan yang terbagi lagi atas 287 desa dan 7 kelurahan. Empat belas kecamatan tersebut adalah kecamatan Sarang, Kragan, Sale, Sedan, Pamotan, Sluke, Lasem, Pancur, Gunem, Bulu Mantingan, Sumber, Sulang, Kaliori, dan Rembang. Kondisi fisiologi dan geologi sebagian tanah di Kabupaten Rembang adalah dataran tinggi/ pegunungan yang termasuk dalam gugus Pegunungan Kapur Utara, dan sebagian lagi merupakan tanah pantai. Kecamatan yang memiliki desa di pegunungan adalah Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem. Sementara itu kecamatan yang mempunyai desa yang terletak di daerah pantai, yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Bentang terpanjang wilayah Kabupaten Rembang adalah 60 km dan bentang terpendek adalah 23 km. (<http://rembang.co.id> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

### **Gambaran Umum Kabupaten Rembang**

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 1998 sebesar 556.699 jiwa dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan rata-rata 0,8 persen per tahun, pada tahun 2008 penduduk

Rembang berjumlah 602.044 jiwa. Selama tahun 2008 persebaran penduduk yang jumlahnya terbesar berada di Kecamatan Rembang sebanyak 82.961 jiwa dan persebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunem dengan jumlah sebanyak 23.419 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang tertinggi dialami oleh Kecamatan Pamotan dengan pertumbuhan sebesar 1,34 % dan yang terkecil dialami oleh Kecamatan Rembang dengan pertumbuhan sebesar 0,27 %.

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berjumlah 166.421 jiwa, sedangkan tenaga kerja di sektor perikanan berjumlah 18.900 orang atau 11,3% dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian Kabupaten Rembang. Potensi perikanan di Kabupaten Rembang juga meliputi kegiatan produksi seperti meliputi pengeringan, pengasapan, pemindangan, terasi, kerupuk ikan atau udang dan lain sebagainya. Dari tabel di atas hampir 52,6 % dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2008 tinggal di kawasan pesisir, yaitu: 316.724 jiwa. Sedangkan komposisi tenaga kerja berdasar lapangan usaha di Kabupaten Rembang masih didominasi tenaga kerja pertanian. Lebih dari lima puluh persen tenaga kerja di Kabupaten Rembang terserap di sektor pertanian perdesaan secara luas yang meliputi pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.

Mata pencaharian dan perekonomian di Kabupaten Rembang sebagian besar disokong oleh industri perikanan dan pertanian. Tetapi hal tersebut tidak terlalu memberi efek secara signifikan bagi masyarakat pesisir. Karena lingkungan masyarakat pesisir yang tinggal di daerah pantai, terutama sekitar pelabuhan kota Rembang didominasi oleh nelayan-nelayan kecil yang melaut menggunakan kapal kecil dan peralatan sederhana, sedangkan para nelayan yang memiliki kapal besar masih jarang.

Masyarakat petani di Kabupaten Rembang juga mengalami permasalahan terkait kurangnya alat pertanian dan akses jalan untuk pendistribusian hasil-hasil pertanian. Sehingga saat ini masalah pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan daerah di Kabupaten Rembang. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk miskin diketahui mengalami kenaikan dari 46.545 jiwa di tahun 2004 menjadi 187.736 jiwa pada tahun 2008. Selain itu Sejak tahun

2005 Kabupaten Rembang masuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Dari kriteria tersebut tercatat sebanyak 134 dari total 294 desa/ kelurahan atau 45,57 % termasuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Rembang, lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 33,2 %. (<http://rembangkab.go.id/profil-daerah/kependudukan> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

Tingkat pendidikan di Rembang sudah tergolong maju. Kemajuan pendidikan suatu daerah salah satunya dapat diukur dengan seberapa banyak sekolah yang ada di daerah itu. Berdasarkan tabel 5, terbukti bahwa jenjang pendidikan dari yang paling rendah (TK/RA) sampai yang paling tinggi (Sekolah Tinggi) sudah terdapat di kabupaten Rembang. Sekolah-sekolah yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun sudah tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten Rembang. Ada dua tipe sekolah untuk kurikulum ilmu-ilmu umum dan agama di jenjang Taman Kanak-kanak (TK dan RA), Sekolah Dasar (SD dan MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP dan MTs). Sedangkan pada jenjang sekolah menengah ada tiga tipe, yaitu sekolah untuk ilmu umum (SMA), ilmu agama (MA), dan keahlian (SMK).

Pendidikan di Kabupaten Rembang tidak menjadi perhatian bagi masyarakat di desa-desa tertentu. Seperti desa-desa yang berada di sekitar pantai atau pegunungan kapur. Terutama di desa-desa tertinggal jenjang pendidikan masyarakat hanya lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Tidak mengherankan jika pendidikan masih memerlukan banyak pembenahan dan pembangunan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang.

Masyarakat Rembang memeluk berbagai macam agama. Ada masyarakat yang beragama Budha, Islam, Katholik, dan Kristen. Mayoritas masyarakat Rembang beragama Islam. Masyarakat yang beragama Islam sebanyak 435.330 jiwa, Kristen sebanyak 3.738 jiwa, Katholik sebanyak 2.419 jiwa, dan Budha sebanyak 679 jiwa. (<http://rembangkab.go.id/profil-daerah/kependudukan> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

Mayoritas masyarakat Rembang yang beragama Islam ini menjadi barometer pengembangan agama Islam berjalan cukup baik. Dengan adanya beberapa pondok pesantren yang memiliki pengaruh terhadap tumbuhnya nilai-

nilai religius di Kabupaten Rembang. Salah satunya pondok pesantren Raudlatut Tholibin yang didirikan oleh KH Bisri Mustofa.

Kondisi geografis Kabupaten Rembang sebagai daerah yang berpantai menciptakan perilaku sosial masyarakat yang berbeda di tiap kawasan. Seperti kawasan daerah-daerah sekitar pantai, umumnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya berperangi keras dan dalam percakapan sering menggunakan kata-kata kasar cenderung berteriak. Hal ini dikarenakan kondisi daerah tempat tinggalnya yang dekat dengan pantai, berangin kencang dan suara ombak sangat kuat, jika berbicara tidak seperti berteriak lawan bicaranya tidak akan mendengar.

Pusat kota Rembang, dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari beragam profesi. Baik penduduk lokal maupun pendatang. Lebih teratur dalam tatanan kehidupan dan dalam berperilaku antar sesama. Karena daerah kota Rembang selain sebagai pusat perekonomian dan administrasi daerah juga digunakan sebagai pusat religi, banyak dijumpai pondok-pondok pesantren dalam skala kecil maupun besar. Sehingga pemandangan yang dijumpai ketika memasuki kota Rembang adalah penduduk usia sekolah yang mengenakan pakaian sesuai syariat agama Islam.

Pondok pesantren yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan beragama di Kabupaten Rembang adalah pondok pesantren yang didirikan oleh KH.Cholil Bisri, pengaruhnya pun sudah meluas secara nasional. Hal ini juga menjadi suatu kekuatan politik terkuat di Kabupaten Rembang, dengan partai PKB sebagai partai islam yang memiliki jumlah pendukung terbanyak di sana. Kyai tetap merupakan figur sentral dalam pengambilan keputusan. Sehingga setiap tindakan yang diambil oleh seorang kyai sangat berpengaruh terhadap santri-santri, termasuk dalam bidang politik.

### **Latar Belakang Berdirinya Partai Demokrat di Kabupaten Rembang dan Gambaran Umum Struktur Organisasinya**

Partai demokrat berdiri di Rembang dan pengurus pertama diketuai oleh Moch. Salim. Pengusaha sukses yang memiliki anak perusahaan dan tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Rembang. Bidang usahanya meliputi perikanan dan kayu. Bagi keorganisasian partai baru yang sedang merintis membutuhkan dukungan finansial, pemilihan Moch. Salim sebagai ketua DPC partai Demokrat kabupaten Rembang dengan latar belakang figurnya sebagai



seorang pengusaha, dianggap mampu menyokong kebutuhan-kebutuhan internal dan eksternal partai agar dapat menjalankan program yang nantinya akan dicanangkan dalam pemilihan kepala daerah. Penentuan tersebut diperkuat dengan loyalitas dan keinginan dari Moch. Salim untuk membangun dan memajukan perekonomian masyarakat Rembang, berdasarkan hal itu kemudian DPC partai Demokrat Rembang mencalonkan Moch. Salim sebagai calon bupati pada pemilihan kepala daerah 2005. ( Moch. Charis Kurniawan, S.IP )

Struktur organisasi cabang Partai Demokrat di Kabupaten Rembang. Terdiri dari nama-nama yang dipilih internal dalam rapat dan dianggap mampu mewakili dan mendukung kinerja Partai Demokrat cabang Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk perekrutan anggota sebagai kekuatan basis massa, Partai Demokrat membuka seluas-luasnya tidak terpatok pada status. Lebih ditekankan pada loyalitas anggota kepada partai. Mengenai keanggotaan pasal-pasalnya diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar Partai Demokrat.

#### **Proses dan Hasil Pilkada di Kabupaten Rembang Tahun 2005**

Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk menuju pilkada Kabupaten Rembang tahun 2005, mengalami perubahan sebelum akhirnya data diserahkan kembali ke KPUD Kabupaten Rembang dan diumumkan verifikasi data oleh KPUD Kabupaten Rembang. Sebelumnya H. Moch. Salim dipasangkan dengan Drs. Mulyono, namun dalam proses Drs. Mulyono tidak sesuai dengan peraturan mekanisme sistem gabungan partai, maka pencalonannya dicabut. Sedangkan Gus Yaquut pada awalnya menjadi calon wakil dari calon bupati Moch. Zahli, tetapi karena calon bupati Moch. Zahli dianggap tidak memenuhi komitmen maka pencalonan Gus Yaquut dicabut, melalui rapat pleno 17 Mei 2005 seperti yang disampaikan oleh koordinator gabungan partai Arief Budiman SE. (<http://suaramerdeka.com> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB)

Data terakhir yang masuk ke KPUD Kabupaten Rembang menjelang 27 Juni 2005 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing di pilkada berjumlah empat orang. Dicalonkannya H. Moch. Salim dengan Gus Yaquut membuat peta kekuatan politik di Kabupaten Rembang berubah, karena calon pemilih masyarakat Rembang mayoritas adalah Nahdhiyin, jelas dipastikan pasangan tersebut akan menempati posisi teratas dan memenangkan pilkada.

Penentuan calon bupati yang dipilih dilihat dari kinerja dan loyalitas beliau sebagai ketua dan kontribusinya terhadap perkembangan partai Demokrat memberikan penilaian tersendiri dari pengurus-pengurus lainnya kemudian pada rapat bersama menyatakan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang Moch. Salim dijagokan pada pemilihan kepala daerah masa jabatan 2005/2010. Selain hal tersebut, Moch. Salim figurnya dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat Rembang, mampu mewujudkan dan mengembangkan aspirasi dan keinginan rakyat Rembang untuk kemajuan bersama.

Pilkada kabupaten Rembang tepatnya dilakukan pada tanggal 27 Juni 2005. Pemilihan umum dilaksanakan dengan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusung oleh partai. Jumlah pasangan cabup dan cawabup ada 4 pasang. Pasangan nomor urut 1 diusung oleh partai Golkar. Pasangan nomor urut 2 diusung oleh PPP. Pasangan nomor urut 3 diusung oleh partai Demokrat dan PKB. Pasangan nomor urut 4 diusung oleh PDI.

Pilkada dilakukan serentak di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Rembang. Masyarakat melakukan pemilihan di sejumlah TPS yang sudah ditentukan oleh KPU daerah dan telah tersebar di desa-desa setiap kecamatan. Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Rembang tahun 2005 sebagaimana disajikan dalam tabel 13, dapat dilihat bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Moch. Salim dan H. Yaqut Cholil Qoumas mendapatkan suara terbanyak. Kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai Demokrat dan PKB menang mutlak di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Rembang. Hal itu berarti bahwa pasangan dengan nomor urut tersebut memenangkan pilkada tahun 2005 dan menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten Rembang untuk periode 2005/2010.

Kemenangan suara sekitar 50% dari jumlah suara yang ada. Terjadi di kecamatan Rembang kota, Kaliori, Bulu, Gunem, Pamotan, Sale, Pancur, Lasem, Sedan, Kragan, dan Sluke. Rembang kota merupakan domisili dari Moh. Salim dan Yaqut Qoumas, menjadikan popularitas pasangan ini sangat tinggi sehingga memperoleh suara banyak. Salah satunya kecamatan Kaliori dijadikan H. Moch. Salim sebagai daerah untuk mengembangkan bisnis perikanannya. Dengan kondisi yang seperti itu, menjadikan H. Moch. Salim lebih mudah untuk

mempengaruhi masyarakat agar memilihnya, begitu juga di daerah lainnya. Sedangkan Yaqut Qolil atau biasa dikenal dengan Gus Tutut merupakan sosok yang hidup dalam naungan keluarga KH. Cholil Bisri yang memiliki pengaruh besar dan terkenal di kabupaten Rembang.

Ketaatan dan penghormatan seorang santri yang pernah berguru ke kiai, tidak hanya sebatas saat ia mengaji atau mondok di pesantren, sangat berpengaruh pada kehidupan sosial di masyarakat tetapi juga pada kehidupan politik dan struktur organisasi politik yang didirikan. ( Syamsudin Haris, 2005: 32).

### **Strategi Pemenangan Partai Demokrat pada Pilkada di Kabupaten Rembang Tahun 2005**

Langkah awal yang dilakukan partai Demokrat untuk memenangi pilkada 2005 di kabupaten Rembang adalah dengan melaksanakan koordinasi secara rutin dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat kabupaten Rembang. Organisasi itu bertanggung jawab penuh atas persiapan awal, proses, hingga hasil akhir pada pilkada. BAPPILU telah melakukan koordinasi sampai tingkat desa untuk mempermudah melakukan pergerakan persuasif agar dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Partai Demokrat mencalonkan H. Moch. Salim sebagai pengusaha terkenal di kabupaten Rembang yang menguasai bidang perikanan dan perikanan. Sebagai seorang pengusaha, Salim mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Rembang. Agar bisa menarik aspirasi masyarakat dengan maksimal, Salim dipasangkan dengan H. Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan tokoh dari kalangan agamis yang cukup terkenal di kabupaten Rembang. Yaqut adalah keponakan dari seorang kyai yang memiliki pengaruh besar di kabupaten Rembang yaitu KH. Cholil Bisri. Beliau merupakan figur sesepuh kyai di Rembang yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Rembang. Seperti yang disampaikan oleh coordinator Gabungan Partai Arief Budiman SE ketika mendaftarkan Gus Tutut di KPUD, bahwa pencalonan Gus Tutut sudah direstui oleh para kyai sepuh. Sehingga memiliki keyakinan besar akan memenangi pilkada hampir keseluruhan di tiap daerah pemilihan.

Kharisma dari calon bupati H. Moch. Salim sangat berpengaruh sekali di daerah-daerah seperti Rembang, Kaliorejo, Lasem dan Sale. Dimana di kota tersebut tempat berdirinya usaha industri pribadi H. Moch. Salim, sehingga

karyawan-karyawan dan masyarakat luar yang memiliki hubungan dagang memberikan suara pilihannya untuk pasangan H. Moch. Salim dengan Gus Tutut. Sedangkan Gus Tutut memenangkan suara di kota-kota yang menjadi pusat religi dengan adanya pondok-pondok pesantren berbasis Nahdhiyin yaitu di Rembang, Lasem, Pamotan dan Sarang.

Perpaduan figur pengusaha dan figur tokoh agama menjadi kekuatan yang besar untuk memenangkan pilkada 2005. Terbukti, hasil akhir pilkada 2005 kabupaten Rembang pasangan tersebut menang mutlak di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Rembang. Perolehan suara secara keseluruhan, pasangan Salim-Yaqut mendapat 158.090 suara (49,14%).

Strategi lainnya yang diusung oleh Partai Demokrat dalam kampanye pilkada pertama di Kabupaten Rembang ini dengan membidik kondisi masyarakat Rembang dari aspirasi yang dikumpulkan oleh Badan Pemenangan Pemilu. Yaitu mencetuskan program-program kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Rembang secara menyeluruh, sehingga dapat menyentuh segala golongan yang ada. Pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, jaminan kehidupan bagi warga miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang. Sesuai dengan yang tertuang di dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 kampanye yang dilakukan oleh pasangan H. Moch. Salim dan Gus Yaqut masih di dalam jalur yang dibenarkan oleh KPU. Tidak melanggar norma-norma dalam pemilihan, misalkan seperti adanya isu politik uang.

Sumber pendanaan kampanye seperti yang disampaikan oleh bupati terpilih H.Moch Salim berasal dari dana pribadi, dan sumbangan dari pihak sponsor yang mendukung kampanye pasangan tersebut. Sumbangan yang diterima juga yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena semua dana kampanye digunakan untuk memperlancar proses pilkada. Selain itu bupati terpilih H.Moch Salim menambahkan bahwa pencapaian pilkada yang demokratis sesuai dengan peraturan adalah tujuan jangka panjang saat ini, mengenai dana kampanye itu menjadi pokok permasalahan penting dalam kampanye. Aspirasi masyarakat Rembang untuk menuju pemerintahan dan perekonomian yang lebih maju, menjadi program utama dibalik kesuksesan menjadi bupati terpilih.

Menghidupkan perekonomian Kabupaten Rembang seperti yang disampaikan oleh bupati terpilih H.Moch Salim sebagai program kerja seratus hari yaitu revolusi agro. Untuk revolusi agro ini diusung secara pribadi oleh calon bupati dari hasil pengamatan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat Rembang, dalam hal ini bidang peternakan dan pertanian di pedesaan yang masih bersifat tradisional. Konsep revolusi agro ini telah dipersiapkan secara penuh, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat Rembang terutama di pedesaan hanya menggunakan peralatan yang sudah disubsidi oleh pemerintah daerah. (<http://suaramerdeka.com> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB)

Salah satunya dengan memberikan kebutuhan dalam peternakan dan pertanian, yaitu pemberian enzim suplemen bagi peternakan dan pertanian. Enzim tersebut, digunakan untuk campuran minuman ternak sapi. Ternyata, dengan enzim tersebut perkembangan tubuhnya menjadi pesat. Sementara itu sisa enzim yang terbuang melalui air kencing dan kotoran sapi, juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyuburkan tanah.

Strategi yang dilakukan partai Demokrat dalam memenangi pilkada 2005 di kabupaten Rembang adalah membangun koalisi yang tepat dengan partai Islami, yaitu PKB, dan memilih figur calon yang berpengaruh di kabupaten Rembang. Tokoh kapitalis dan agamawan sangat berpengaruh di kabupaten Rembang. Hal itu disesuaikan dengan sosiokultur masyarakat Rembang, sehingga partai Demokrat memanfaatkan itu dengan baik dengan mengusung H. Moch. Salim seorang pengusaha dan Gus Yaqut seorang kyai atau ulama'.

## PENUTUP KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh simpulan bahwa :

1. Pasca orde baru terjadi perubahan sistem politik dari pemerintah pusat ke daerah. Menuntut adanya demokratisasi. Salah satu produknya adalah pemilihan umum secara langsung dianggap lebih demokrasi dibanding dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya. Hal ini kemudian melatar belakangi diadakannya pemilihan kepala daerah, karena juga merupakan perwujudan dari demokratisasi yang diharapkan oleh warga negara Indonesia.
2. UU No.32 Tahun 2004 menjadi awal sistem politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi, termasuk pemilihan kepala daerah kemudian menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh daerah-daerah, dan pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator, bertindak ketika kegiatan tersebut terjadi kecurangan.
3. Tujuan pemilihan kepala daerah adalah pembelajaran demokrasi dan politik di tingkat lokal, juga merupakan sebuah awal untuk membangun *local good govermance*, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah daerah. Menunjuk putra daerah yang unggul dan mampu loyal terhadap daerahnya untuk membangun dan menyejahterakan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan porsi kebutuhannya dan mampu membangun potensi daerah yang menjadi penyangga perekonomian nasional dan penyangga stabilitas politik nasional.

## SARAN

Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumber data dan wacana dalam bidang sejarah politik. Dan juga sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan berpolitik.

### 2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, yang tertarik terhadap perkembangan politik terutama pada tingkat lokal, diawali pada tahun 2005 hingga sekarang, masih banyak peristiwa dalam kaitannya partai politik dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

### 3. Partai Demokrat

Kepada Partai Demokrat sebagai partai pemenang dalam pemilihan umum nasional dan dalam pemilihan kepala daerah di tingkat lokal seharusnya tidak hanya menekan pada aspek perbaikan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Rembang yang dicantumkan dalam program kerja bupati dan wakil bupati masa jabatan 2005-2009, tetapi aspek pendidikan politik ke masyarakat juga penting untuk dijadikan wacana kedepannya agar dapat membentuk masyarakat yang lebih demokratis menuju *local good governance* yang mampu menyangga stabilitas kehidupan perpolitikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Logos Wacana.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hadari Nawawi. 1995. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Helius Sjamsuddin. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.

Helius Syamsuddin dan Ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ignas Kleden, Syamsudin Haris. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian-Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Kuntowijoyo.1995. *Metodologi Sejarah*.Yogyakarta: Tiara Wacana.

Maurice Duverger . 1993 . *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Mohtar Mas'oe'd. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES

Ramlan Subakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Rineka Cipta

Rener, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pelajar.

Sidi Gazalba. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya: Aksara.

### Internet

<http://monaliasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-demokrasi-html> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB



<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://rembang.co.id> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://rembangkab.go.id/profil-daerah/kependudukan> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://dinpendik.rembangkab.go.id> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/mur02.htm> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/14/mur5.htm> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/29/mur2.htm> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/02/mur06.htm> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=125257> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB